
PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA
DI PEMERINTAH DESA BALONGDOWO KECAMATAN CANDI

Pungki Rokmahwati¹, Ilmi Usrotin Choiriyah²

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu
Sosial

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

e-mail korespondensi: ilmiusrotin@umsida.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pengembangan kapasitas sumber daya manusia aparatur di Pemerintahan Desa Balongdowo, Kecamatan Candi. Pengembangan kapasitas aparatur desa dikaji melalui indikator pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja, serta dilihat dari dimensi kepemimpinan dan dukungan organisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang meliputi kepala desa, sekretaris desa, bendahara, dan perangkat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparatur desa memiliki latar belakang pendidikan yang beragam. Pelatihan bagi perangkat desa dilaksanakan melalui bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh pihak kecamatan, terutama yang berkaitan dengan penggunaan teknologi administrasi pemerintahan dan pelayanan publik, sementara pelatihan yang bersumber dari desa lebih banyak diarahkan pada kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pengalaman kerja aparatur desa terbentuk dari perbedaan masa kerja dan rentang usia, yang tercermin dalam pelaksanaan tugas administrasi dan penggunaan sistem kerja berbasis teknologi. Pengembangan kapasitas aparatur desa juga didukung oleh peran kepemimpinan dan koordinasi antartingkat pemerintahan.

Kata kunci: Aparatur Desa, Pengembangan Kapasitas, Sumber Daya Manusia.

Abstract

This study aims to describe the development of human resource capacity among village officials in Balongdowo Village, Candi Subdistrict. Human resource capacity development is examined through the indicators of education, training, and work experience, as well as through the dimensions of leadership and organizational support. This study employs a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through interviews, observation, and documentation involving the village head, secretary, treasurer, and other village officials. The findings show that village officials have diverse educational backgrounds. Training for village officials is conducted through technical guidance programs organized by the subdistrict government, particularly related to the use of administrative technology and public service systems, while training funded by the village budget is primarily directed toward community empowerment activities. Work experience among village officials is shaped by differences in length of service and age range, which are reflected in the implementation of administrative tasks and the use of technology-based work systems. The development of village officials' capacity is also supported by leadership roles and intergovernmental coordination.

Kata kunci: Village Apparatus, Capacity Development, Human Resources.

A. PENDAHULUAN

Pemerintah desa bertanggung jawab atas pelayanan publik dan program pemerintah untuk menjaga kesejahteraan Masyarakat (Mozin & Isa, 2023). Dalam sistem pemerintahan Indonesia, pemerintah desa adalah unit pemerintah daerah yang paling dekat dengan masyarakat dan bertanggung jawab untuk mengelola administrasi negara (Choiriyah et al., 2021). Mereka juga bertanggung jawab untuk melayani kepentingan lokal. Selain menjadi unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat, pemerintahan desa merupakan tombak strategi untuk mencapai semua program (Ramli, 2020).

Ketentuan tersebut selaras dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa, menegaskan bahwa desa merupakan bagian integral dari struktur pemerintahan daerah dan memiliki kewenangan untuk mengelola urusan masyarakat lokal berdasarkan hak-hak adat serta

tradisi setempat. Hal ini memperkuat posisi strategis desa dalam pembangunan dan pelayanan publik, sehingga dibutuhkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan efektif dan maksimal.

Lebih lanjut, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 menyediakan regulasi rinci terkait posisi, persyaratan, serta prosedur pembinaan aparatur desa sebagai komponen esensial dalam pengelolaan pemerintahan desa. Ketentuan ini menegaskan peran krusial desa dalam pembangunan, sehingga kemampuan sumber daya manusia di tingkat desa perlu ditingkatkan guna melaksanakan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik secara efektif dan maksimal.

Sumber daya manusia (SDM) yang kuat dan fleksibel diperlukan untuk pembangunan desa, yang merupakan pilar pembangunan nasional. Dan aparatur desa yang bekerja di dalamnya perlu bekerja dengan baik dan bertanggung jawab sesuai tugasnya (Rodiyah et al., 2021). Peningkatan profesionalisme aparatur desa sangat penting untuk meningkatkan pemberian layanan publik dan tata kelola desa secara keseluruhan (Fitriani et al., 2021). Oleh karena itu, pengembangan kapasitas diperlukan bagi aparatur desa di Indonesia untuk meningkatkan keterampilan dan kinerja mereka (Adhi Hapsari, 2021).

Sesuai yang tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, perangkat desa diharapkan dapat melaksanakan tugas mereka untuk memberikan layanan kepada masyarakat desa dengan cara yang sesuai dengan prinsip pelayanan publik. Pemerintah desa harus berusaha untuk meningkatkan kapasitas aparturnya. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi inti mereka secara efektif, perangkat desa memerlukan pemahaman terhadap tugasnya dengan baik, memiliki keterampilan untuk melaksanakan, dan kemampuan yang komprehensif (Moeljono & Alfiyanto, 2020). Pengembangan kapasitas adalah langkah penting yang bertujuan untuk membuat kinerja suatu

organisasi menjadi lebih efisien, efektif, dan mampu merespons berbagai kebutuhan dengan lebih baik (Pramono & Suranto, 2022).

Di era otonomi, optimalisasi pemerintahan desa dan daerah bergantung pada peningkatan kapasitas SDM aparatur. Hal ini dicapai melalui pelatihan, pendidikan, dan bimbingan teknis untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam pelayanan publik dan penggunaan teknologi informasi (Hidayat et al., 2024). Untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama dalam hal ekonomi, sosial, dan lingkungan, diperlukan peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) (Lumbanraja & Lumbanraja, 2024). Fokus pengembangan kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintah adalah meningkatkan profesionalisme dan keterampilan teknis. Program pelatihan dan pendidikan seperti pendidikan formal dan bimbingan teknis (Bimtek) sangat penting untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas pelayanan (Sabilatur Rosyidah et al., 2023). Pemerintah daerah harus memprioritaskan pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan dan meningkatkan keterampilan aparatur untuk mengatasi masalah ini dan meningkatkan kualitas pelayanan publik (Agusta & Jaya, 2021). Berikut adalah data struktur Aparat dalam Pemerintahan Desa Balongdowo:

Tabel 1. Data Struktur Aparat Pemerintahan Desa Balongdowo

No.	Nama Perangkat Desa	Jabatan
1.	Arief Dwi Winarko	PJ. Kepala Desa
2.	Moch. Yatim	Sekretaris
3.	Lubab Elfaidhoh Rifhani	Bendara
4.	Susanto Dwi Yulianto	Kaur TU dan Umum
5.	Andiono	Kaur Pemerintahan
6.	Cikita Luthfi Maulana Aziz	Kaur Pelayanan
7.	Azmil Zachiro	Kaur Perencanaan
8.	M. Nur Afief Alfithon	Kaur Kesejahteraan
9.	Soliq	Kasun Balongdowo
10.	Hamry Oki	Kasun Tempel

Sumber: Pemerintahan Desa Balongdowo, tahun 2025

Berdasarkan tabel 1 diatas, dari segi kelembagaan Pemerintah Desa Balongdowo memiliki struktur organisasi yang meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, serta Kepala Dusun, masing-masing dengan fungsi dan tanggung jawab sesuai bidangnya. Struktur ini dirancang untuk menjamin pembagian tugas yang jelas serta koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Keberadaan struktur tersebut menjadi elemen penting dalam mendukung pelaksanaan fungsi pelayanan publik, administrasi kependudukan, pengelolaan keuangan, dan program pembangunan desa. Namun dalam praktiknya, di Pemerintahan Desa Balongdowo terdapat beberapa permasalahan yang mempengaruhi pengembangan kapasitas kualitas Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan tugasnya.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Balongdowo, terdapat kondisi yang berkaitan dengan karakteristik sumber daya manusia aparatur desa. Salah satu kondisi yang ditemukan adalah adanya perangkat desa yang berada pada rentang usia lanjut. Kondisi usia tersebut berhubungan dengan cara perangkat desa dalam memahami dan menggunakan teknologi informasi yang saat ini digunakan dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Seiring dengan penerapan sistem kerja berbasis digital, perangkat desa dengan latar usia tersebut menghadapi proses penyesuaian dalam menjalankan tugas-tugas yang melibatkan penggunaan teknologi.

Selain itu, kondisi lain yang ditemukan berkaitan dengan penguasaan teknologi informasi oleh perangkat desa dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan. Penggunaan aplikasi administrasi, sistem pendataan, serta layanan berbasis digital menjadi bagian dari aktivitas kerja sehari-hari di lingkungan pemerintahan desa. Dalam konteks tersebut, perangkat desa mengikuti kegiatan bimbingan teknis sebagai sarana untuk memahami dan menyesuaikan diri dengan penggunaan teknologi serta kebijakan administrasi yang berlaku. Kegiatan bimbingan teknis ini menjadi

bagian dari proses pengembangan kapasitas perangkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu membahas tentang pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pemerintahan desa. Penelitian yang pertama dilakukan oleh Haliza dan Fatimah (2024), dengan judul “Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Kompetensi Aparatur Desa di Desa Kaluppini Kabupaten Enrekang”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan SDM di Desa Kaluppini sudah berjalan cukup baik, ditinjau dari aspek motivasi, kepribadian, dan keterampilan. Kompetensi aparatur juga tergolong baik dalam pengetahuan, keahlian, dan sikap kerja. Namun, keterbatasan waktu akibat pekerjaan sampingan serta kendala jaringan menjadi hambatan dalam pelaksanaan pelatihan secara optimal.

Kedua, Khumaidi dan Hani Fani (2023) membahas tentang pengembangan kapasitas aparatur desa dengan judul “Strategi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa Sentul Purwodadi Pasuruan”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggambarkan strategi peningkatan kapasitas melalui pelatihan berkelanjutan, penguatan partisipasi masyarakat, serta dukungan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparatur desa telah memiliki pengalaman dan partisipasi masyarakat yang cukup baik, namun masih menghadapi hambatan seperti keterbatasan infrastruktur, akses teknologi, dan lambat nya regenerasi aparatur

Ketiga, Penelitian terdahulu dilakukan oleh Titis Wisnu Wijaya, Cahya Damarjati, dan Aprilia Kurnianti (2023) dengan judul "Peningkatan Sumber Daya Manusia Dalam Mengelola Sistem Informasi Desa Berbasis Website". Penelitian ini berfokus pada peningkatan kemampuan aparatur Desa Darmayasa dalam mengelola website desa. Metode yang digunakan adalah workshop dan pelatihan berbasis *problem-based learning*. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa kemampuan sumber daya manusia meningkat, target pembaruan satu berita seminggu telah dicapai selama dua bulan periode pemantauan.

Penelitian sebelumnya telah membahas pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan desa, tetapi sebagian besar hanya berfokus pada elemen tertentu, seperti pelatihan berbasis teknologi, peningkatan keterampilan komunikasi, atau memperkuat kelembagaan desa. Dengan demikian, terdapat *research gap* yang perlu dijawab melalui studi ini, yaitu belum adanya kajian yang mengintegrasikan ketiga indikator pengembangan kapasitas SDM mengenai pendidikan, pelatihan, dan pengalaman dalam konteks pemerintahan desa yang menghadapi keterbatasan sumber daya dan tantangan adaptasi teknologi.

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menggambarkan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di Pemerintah Desa Balongdowo, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, dengan menggunakan teori Griffin (2004) yang menitikberatkan pada tiga indikator utama: pendidikan, pelatihan, dan pengalaman.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pengembangan kapasitas sumber daya manusia di Pemerintahan Desa Balongdowo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Fokus utama penelitian ini adalah menggambarkan secara rinci kondisi faktual yang berkaitan dengan tingkat pendidikan, penguasaan teknologi, serta pelaksanaan pelatihan bagi perangkat desa (Nikodimus, 2022).

Teknik yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah purposive sampling. Purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel non-acak yang digunakan dalam penelitian untuk memilih sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Candra Susanto et

al., 2024). Penelitian ini melibatkan sekertaris desa dan aparatur desa di kantor Pemerintahan Desa Balongdowo sebagai informan.

Dalam penelitian kualitatif biasanya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data (Ardiansyah et al., 2023). Kumpulan makalah ini mengeksplorasi berbagai metodologi dan topik penelitian menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer umumnya dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi (Yuliana, 2024). Sementara data sekunder diperoleh dari literatur, artikel ilmiah, dokumen, dan media massa (Alianinggrum et al., 2023).

Penelitian ini berfokus pada pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di kantor Pemerintahan Desa Balongdowo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Dengan menggunakan teori kapasitas SDM menurut Griffin, yakni: Pendidikan, Pelatihan, dan Pengalaman.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pendidikan

Pendidikan dalam teori Griffin, merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan kapasitas sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Pendidikan memberikan dasar pengetahuan dan pemahaman yang digunakan aparatur dalam melaksanakan tugas administrasi, memahami kebijakan, serta menjalankan fungsi pemerintahan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai pendidikan perangkat desa diperlukan untuk menggambarkan latar belakang sumber daya manusia yang ada di Pemerintahan Desa Balongdowo.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pemerintah Desa Balongdowo, perangkat desa memiliki latar belakang pendidikan yang beragam, mulai dari jenjang SMP, SMA/SMK, hingga pendidikan tinggi. Keberagaman tingkat pendidikan tersebut mencerminkan perbedaan latar belakang akademik aparatur yang

menjalankan tugas pemerintahan desa. Dalam praktiknya, perangkat desa dengan berbagai jenjang pendidikan tersebut tetap terlibat dalam pelaksanaan tugas administrasi, pelayanan masyarakat, serta kegiatan pemerintahan desa sesuai dengan pembagian tugas dan fungsi masing-masing.

Berikut adalah data jenjang pendidikan yang telah ditempuh oleh seluruh perangkat desa di Pemerintahan Desa Balongdowo, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo:

Tabel 2. Data Jenjang Pendidikan Perangkat Desa Balongdowo,
Kab. Sidoarjo

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah Perangkat Desa
1.	SMP Sederajat	1
2.	SMA/SMK Sederajat	4
3.	Sarjana	5
Total		10 Perangkat Desa

Sumber: Pemerintahan Desa Balongdowo, tahun 2025

Data menunjukkan bahwa dari sepuluh perangkat desa yang ada, sebagian telah menempuh pendidikan tinggi, sementara lainnya berada pada jenjang pendidikan menengah dan pertama. Kondisi ini menggambarkan komposisi sumber daya manusia yang ada di lingkungan Pemerintahan Desa Balongdowo. Setiap perangkat desa menjalankan perannya sesuai dengan tanggung jawab jabatan yang diemban, baik dalam pelayanan administrasi, pengelolaan data, maupun pelaksanaan program desa.

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, latar belakang pendidikan menjadi bagian dari karakteristik aparatur desa yang membentuk cara kerja dan pemahaman terhadap administrasi pemerintahan. Perangkat desa dengan jenjang pendidikan yang berbeda bekerja secara bersama-sama dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Untuk mendukung pemahaman

terhadap tugas dan sistem administrasi yang digunakan, perangkat desa mengikuti berbagai kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh pihak terkait.

Dengan demikian, indikator pendidikan dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis latar belakang akademik perangkat desa di Pemerintahan Desa Balongdowo sebagai bagian dari karakteristik sumber daya manusia yang menjalankan fungsi pemerintahan desa. Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya oleh Riewpassa, Latuheru, & Touwely (2025) yang berjudul *“Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Desa: Upaya Mewujudkan Pelayanan Prima”*, ditemukan hasil yang serupa, yaitu pendidikan formal menjadi faktor kunci dalam peningkatan kapasitas aparatur desa.

2. Pelatihan

Dalam teori Griffin, pelatihan dipandang sebagai salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan proses pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam organisasi. Pelatihan berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan untuk membantu aparatur memahami cara kerja, prosedur, dan sistem yang digunakan dalam pelaksanaan tugas. Pada konteks Pemerintahan Desa Balongdowo, pelatihan berkaitan erat dengan penggunaan teknologi informasi yang digunakan dalam administrasi pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat.

Seiring dengan diterapkannya berbagai sistem administrasi berbasis digital, seperti pengelolaan data kependudukan, pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk), serta sistem perpajakan Coretax, perangkat desa terlibat langsung dalam penggunaan teknologi tersebut. Penggunaan teknologi ini menjadi bagian dari aktivitas kerja sehari-hari perangkat desa, mulai dari penginputan data, pemrosesan dokumen, hingga pelayanan administrasi kepada

masyarakat. Kondisi ini menempatkan penguasaan teknologi sebagai bagian dari kebutuhan kerja aparatur desa.

Hasil wawancara dengan Moch. Yatim, Sekretaris Desa Balongdowo. Beliau mengatakan:

“Kemungkinan kalau perangkat-perangkat itu memang seharusnya mendapat pelatihan. Dan biasanya itu dalam setahun sekali penyelenggaraannya. Tapi yang pelatihan-pelatihan dari desa itu difokuskan kepada ibu-ibu PKK dan kader. Karena kegiatan PKK dan kader kan juga penting untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat, kayak misal terkait kesehatan, kesejahteraan keluarga, atau kegiatan sosial lainnya.”

Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Balongdowo menunjukkan bahwa pelatihan bagi perangkat desa direncanakan dalam kerangka pembentukan APBDes dan umumnya diselenggarakan dalam periode tahunan. Namun, dalam praktik perencanaan kegiatan, pelatihan yang dianggarkan oleh pemerintah desa lebih banyak diarahkan pada kelompok PKK dan kader. Hal tersebut berkaitan dengan program pemberdayaan masyarakat yang menjadi bagian dari agenda rutin desa, seperti kegiatan di bidang kesehatan, kesejahteraan keluarga, dan aktivitas sosial kemasyarakatan. Kondisi ini menggambarkan bahwa pelatihan yang bersumber dari anggaran desa lebih difokuskan pada kelompok masyarakat, sementara kebutuhan pelatihan perangkat desa kemudian diakomodasi melalui kegiatan pembinaan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak kecamatan.

Berikut adalah data pelatihan yang pernah diadakan oleh pihak Kecamatan Candi untuk Pemerintahan Desa Balongdowo:

Tabel 3. Data Petalihan yang Diselenggarakan Pihak Kecamatan
Kepada Pemerintahan Desa Balongdowo

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Pelatihan yang Diselenggarakan oleh Kecamatan
-----	---------------------	---

1.	12-02-2025	Evaluasi Pelaksanaan Pemutakhiran dan Pembersihan Data Kependudukan dalam Rangka Perlindungan Arsip
2.	27-05-2025	Bimtek Peningkatan Kapasitas Petugas Pengelola Pelayanan Adminduk 2025
3.	16-06-2025	Pelatihan Enterpreneur Karang Taruna
4.	12-07-2025	Sosialisai dan Pelatihan Perpajakan (Coretax)

Sumber: Pemerintahan Desa Balongdowo, tahun 2025

Dalam pelaksanaannya, perangkat Desa Balongdowo mengikuti berbagai kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh pihak Kecamatan Candi. Pelatihan tersebut mencakup pengelolaan dan pemutakhiran data kependudukan, pelayanan administrasi kependudukan, serta sosialisasi dan penggunaan sistem perpajakan berbasis teknologi. Kegiatan pelatihan ini diselenggarakan sebagai bagian dari pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah desa dalam menjalankan tugas administrasi yang berkaitan dengan penggunaan sistem digital.

Pelatihan yang diselenggarakan oleh kecamatan diikuti oleh perangkat desa yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas administrasi dan pelayanan publik. Melalui kegiatan tersebut, perangkat desa memperoleh penjelasan mengenai alur kerja, prosedur operasional, serta penggunaan aplikasi dan sistem yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Materi pelatihan disesuaikan dengan jenis tugas yang dijalankan, sehingga perangkat desa dapat memahami penggunaan teknologi sesuai dengan bidang kerjanya masing-masing.

Selain sebagai sarana penyampaian materi teknis, pelatihan juga menjadi ruang bagi perangkat desa untuk berinteraksi dengan pihak kecamatan terkait pelaksanaan sistem administrasi yang digunakan. Dalam kegiatan pelatihan, perangkat desa dapat menyampaikan pengalaman penggunaan sistem, serta memperoleh penjelasan mengenai penyesuaian kebijakan dan prosedur

administrasi yang berlaku. Proses ini menunjukkan adanya hubungan antara pelatihan dan kebutuhan penguasaan teknologi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan desa.

Dengan demikian, indikator pelatihan dalam penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan proses penguasaan teknologi oleh perangkat desa melalui kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh pihak kecamatan. Pelatihan dipahami sebagai bagian dari mekanisme pembinaan aparatur desa dalam menyesuaikan diri dengan penggunaan teknologi yang diterapkan dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan publik.

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya oleh Dewi Ratna Bulan Siregar & Ade Suryani (2025) yang berjudul *“Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa melalui Pelatihan Manajemen SDM Berbasis Kompetensi di Desa Tanjung Siram, Kecamatan Bilah Hulu”*, pembahasan pelatihan dalam penelitian ini sama-sama menunjukkan adanya kegiatan pelatihan yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan aparatur desa. Perbedaannya terletak pada fokus pelatihan yang dijalankan, di mana penelitian tersebut menitikberatkan pada pelatihan manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi, sedangkan dalam penelitian ini pelatihan lebih banyak berkaitan dengan penggunaan teknologi dan sistem administrasi pemerintahan desa. Perbandingan ini digunakan untuk menunjukkan variasi bentuk dan fokus pelatihan yang dilaksanakan di tingkat desa sesuai dengan kebutuhan dan konteks masing-masing wilayah.

3. Pengalaman

Selain pendidikan dan pelatihan, pengalaman kerja juga merupakan salah satu indikator penting dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia di pemerintahan desa. Menurut Griffin (2004), pengalaman dipahami sebagai proses pembelajaran yang diperoleh aparatur melalui keterlibatan langsung dalam

pelaksanaan tugas organisasi. Pengalaman terbentuk seiring dengan lamanya masa kerja, intensitas keterlibatan dalam aktivitas pemerintahan, serta interaksi aparatur dengan berbagai kebijakan dan prosedur administrasi. Dalam konteks pemerintahan desa, pengalaman menjadi bagian dari karakteristik sumber daya manusia yang menjalankan fungsi pelayanan publik dan administrasi pemerintahan.

Di Pemerintahan Desa Balongdowo, pengalaman kerja aparatur desa diperoleh melalui keterlibatan dalam berbagai aktivitas pemerintahan desa, mulai dari pelayanan administrasi, pengelolaan data, hingga pelaksanaan program-program desa. Aparatur desa dengan masa kerja yang lebih lama memiliki pengalaman dalam menangani berbagai urusan pemerintahan yang bersifat administratif maupun pelayanan kepada masyarakat. Pengalaman tersebut diperoleh melalui praktik kerja sehari-hari dan keterlibatan langsung dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa.

Informasi tersebut telah disampaikan melalui wawancara dengan Sekretaris Desa, Moch. Yatim:

“Jadi seandainya ada permasalahan apa gitu ya larinya ke Sekdes. Memang saya akui perangkat-perangkat sekarang IT nya oke oke lah. Untuk perangkat yang tua-tua itu memang kurang cakap dalam hal mengoperasikan perangkat yang berbasis teknologi. Tapi dalam hal pengalaman, yang seperti kita ini lebih memiliki banyak pengalaman di lapangan.”

Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Balongdowo menunjukkan bahwa aparatur desa yang telah lama menjabat memiliki pengalaman yang berkaitan dengan pemahaman prosedur kerja, alur administrasi, serta penyelesaian permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan tugas. Aparatur senior sering menjadi rujukan bagi perangkat desa lain ketika menghadapi persoalan yang memerlukan pemahaman terhadap mekanisme kerja pemerintahan

desa. Sementara itu, aparaturnya yang relatif baru memiliki pengalaman lapangan yang lebih terbatas, namun terlibat secara aktif dalam penggunaan teknologi informasi yang digunakan dalam administrasi pemerintahan desa.

Perbedaan pengalaman kerja tersebut terlihat dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Aparatur desa dengan pengalaman kerja lebih lama terbiasa dengan mekanisme kerja yang telah berjalan sebelumnya, termasuk sistem administrasi manual. Di sisi lain, aparaturnya yang lebih baru cenderung berinteraksi langsung dengan sistem administrasi berbasis teknologi, seperti pengelolaan data kependudukan dan penggunaan aplikasi pelayanan publik. Kondisi ini menggambarkan adanya variasi pengalaman kerja di antara perangkat desa sesuai dengan latar belakang masa kerja dan peran yang dijalankan.

Berikut hasil wawancara dengan Kaur TU dan Umum, Pak Susanto mengatakan:

“Mungkin dijamin sekarang yang menggunakan regulasi seperti ini kan ada kesulitan-kesulitan. Makanya kita harus paham betul. Jadi kita harus menanyakan kesulitannya apa, masalahnya apa. Jadi kita harus menanyakannya di Kecamatan solusinya itu gimana. Seperti perubahan dalam mengurus pajak kemarin, yang awalnya diurus langsung ke MPP tapi sekarang tidak. Sekarang mengurus bisa lewat desa, jadi kan perlu penyesuaian, kadang juga ada kesulitan.”

Hasil wawancara dengan Pak Susanto menunjukkan bahwa perubahan kebijakan dan sistem administrasi yang diterapkan di tingkat desa memerlukan penyesuaian dalam pelaksanaan tugas. Perubahan tersebut berkaitan dengan mekanisme pelayanan yang kini dilakukan melalui sistem berbasis teknologi. Dalam pelaksanaannya, perangkat desa melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak kecamatan untuk memahami prosedur dan

penggunaan sistem yang berlaku. Proses ini menjadi bagian dari pengalaman kerja aparatur desa dalam menghadapi perubahan kebijakan dan sistem administrasi pemerintahan. Moch Yatim juga menambahkan lagi:

“Sekarang kan perangkat sudah menggunakan IT semua, beda dengan dulu yang masih menggunakan manual. Jadi seperti perangkat berumur 50 tahun keatas itu juga harus beradaptasi dengan teknologi saat ini. Meskipun begitu terkadang mumet. Contohnya kalau yang berumur diatas 50 tahun itu, belajar aja juga sebisanya, pokok bisa ngetik. Kalau yang macam-macam ya gak bisa, karena ya. Ibaratnya dari segi umur udah kadaluwarsa. Beliau juga berkata bisa ngetik tuh ada perangkat yang mengajari. Karena kalau masalah IT dibanding sama anak-anak ya jauh.”

Moch Yatim juga menjelaskan bahwa penggunaan teknologi informasi telah menjadi bagian dari aktivitas kerja perangkat desa. Seluruh perangkat desa terlibat dalam penggunaan perangkat komputer dan aplikasi administrasi sesuai dengan tugas masing-masing. Aparatur desa yang berada pada rentang usia lebih tua melakukan penyesuaian dalam penggunaan teknologi melalui proses pembelajaran dan pendampingan. Dalam praktiknya, aparatur yang lebih muda memberikan pendampingan kepada aparatur senior dalam penggunaan teknologi yang digunakan dalam administrasi pemerintahan desa.

Proses pendampingan antarperangkat desa tersebut menunjukkan adanya interaksi kerja yang melibatkan pertukaran pengalaman dan pengetahuan. Aparatur senior membagikan pengalaman lapangan dan pemahaman prosedural, sementara aparatur yang lebih muda berbagi pengetahuan terkait penggunaan teknologi dan sistem administrasi berbasis digital. Interaksi ini menjadi bagian dari dinamika pengalaman kerja aparatur desa dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Untuk menggambarkan karakteristik pengalaman aparatur desa yang berkaitan dengan usia, berikut disajikan data distribusi usia perangkat desa di Pemerintahan Desa Balongdowo.

Tabel 4. Distribusi Usia Perangkat Desa Balongdowo, Kab. Sidoarjo

No.	Rentang Usia (Tahun)	Jumlah Perangkat Desa
1.	30-39	5
2.	40-49	2
3.	≥ 50	3
Total		10

Sumber: Pemerintahan Desa Balongdowo, tahun 2025

Berdasarkan tabel distribusi usia perangkat desa Balongdowo, terlihat bahwa aparatur desa berada pada rentang usia yang beragam, mulai dari usia 30 tahun hingga di atas 50 tahun. Komposisi usia tersebut menunjukkan adanya perbedaan latar belakang masa kerja dan pengalaman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan desa. Aparatur desa pada rentang usia 30–39 tahun umumnya merupakan perangkat yang relatif lebih baru, sehingga keterlibatan mereka lebih banyak berkaitan dengan penggunaan sistem administrasi yang saat ini diterapkan. Sementara itu, aparatur desa pada rentang usia 40–49 tahun dan di atas 50 tahun memiliki pengalaman kerja yang terbentuk dari keterlibatan jangka panjang dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, baik dalam pelayanan masyarakat maupun pengelolaan administrasi pemerintahan.

Keberagaman usia tersebut membentuk dinamika kerja di lingkungan Pemerintahan Desa Balongdowo. Aparatur dengan usia yang lebih senior memiliki pengalaman dalam memahami alur kerja pemerintahan desa, prosedur administrasi, serta pola penyelesaian persoalan yang muncul dalam pelayanan kepada masyarakat. Di sisi lain, aparatur dengan usia yang lebih muda terlibat langsung dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan penggunaan teknologi

informasi dan sistem administrasi berbasis digital. Kondisi ini menunjukkan adanya variasi pengalaman kerja yang berjalan secara berdampingan dalam satu struktur pemerintahan desa.

Selain itu, distribusi usia tersebut juga menggambarkan adanya interaksi antarperangkat desa dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Aparatur desa dengan latar usia dan pengalaman yang berbeda saling berkoordinasi dalam menjalankan fungsi pemerintahan, terutama ketika tugas administrasi memerlukan pemahaman prosedural sekaligus penggunaan teknologi. Melalui interaksi tersebut, pengalaman kerja tidak hanya dipengaruhi oleh lamanya masa jabatan, tetapi juga oleh keterlibatan aparatur dalam proses kerja bersama dan penyesuaian terhadap sistem administrasi yang digunakan.

Dengan demikian, data pada tabel distribusi usia memberikan gambaran mengenai variasi pengalaman kerja perangkat desa Balongdowo yang terbentuk dari perbedaan usia dan masa kerja. Variasi tersebut menjadi bagian dari kondisi sumber daya manusia aparatur desa dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya oleh Kuncoro, Hartono, & Wibowo (2024) yang berjudul “*Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia BUMDESA di Kabupaten Tulungagung*”, pembahasan indikator pengalaman dalam penelitian ini sama-sama menunjukkan bahwa pengalaman kerja diperoleh melalui keterlibatan langsung aparatur dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan organisasi. Perbedaannya terletak pada konteks dan ruang lingkupnya, di mana penelitian tersebut berfokus pada pengalaman pengelola BUMDesa dalam kegiatan pengelolaan usaha desa, sedangkan penelitian ini menggambarkan pengalaman perangkat desa dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan administrasi. Perbandingan ini digunakan untuk

menunjukkan bahwa pengalaman kerja dapat terbentuk dalam berbagai konteks organisasi desa, baik dalam pengelolaan unit usaha desa maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Hasil penelitian ini dianalisis menggunakan pendekatan matriks komparatif guna menunjukkan hubungan antarindikator pengembangan kapasitas sumber daya manusia, yaitu pendidikan, pelatihan, dan pengalaman.

Tabel 5. Matriks Komparatif Pengembangan Kapasitas SDM di Pemerintahan Desa Balongdowo

Indikator	Kondisi Aktual	Dampak Terhadap Kinerja	Hubungan dengan Indikator Lain
Pendidikan	Perangkat desa memiliki latar belakang pendidikan yang beragam, mulai dari SMP, SMA/SMK, hingga pendidikan tinggi.	Latar belakang pendidikan membentuk cara aparatur memahami kebijakan, prosedur administrasi, serta penggunaan sistem kerja yang diterapkan di pemerintahan desa.	Latar pendidikan menjadi dasar dalam mengikuti pelatihan dan memengaruhi cara aparatur memanfaatkan pengalaman kerja.
Pelatihan	Pelatihan bagi perangkat desa diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan	Pelatihan menjadi sarana bagi perangkat desa untuk memahami penggunaan teknologi	Pelatihan berperan sebagai penghubung antara latar pendidikan

	teknis dari kecamatan, sementara pelatihan yang bersumber dari desa lebih diarahkan pada PKK dan kader.	administrasi dan sistem pelayanan yang diterapkan dalam pemerintahan desa.	dan pengalaman kerja dalam penggunaan teknologi administrasi.
Pengalaman	Perangkat desa memiliki masa kerja dan rentang usia yang beragam, sehingga pengalaman kerja terbentuk dari keterlibatan jangka panjang maupun penggunaan sistem administrasi terbaru.	Pengalaman kerja tercermin dalam pemahaman alur kerja, penyelesaian tugas administratif, serta penyesuaian terhadap perubahan kebijakan dan sistem kerja.	Pengalaman memperkuat penerapan hasil pendidikan dan pelatihan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan desa.

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Tabel matriks komparatif di atas menggambarkan keterkaitan antara tiga indikator pengembangan kapasitas sumber daya manusia di Pemerintahan Desa Balongdowo, yaitu pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Ketiga indikator tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berhubungan dalam membentuk cara aparatur desa menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Indikator pendidikan menunjukkan latar belakang akademik perangkat desa yang beragam. Perbedaan jenjang pendidikan tersebut membentuk variasi pemahaman aparatur terhadap kebijakan, prosedur administrasi, serta sistem kerja yang digunakan dalam pemerintahan desa. Latar pendidikan ini menjadi dasar bagi aparatur dalam mengikuti kegiatan pelatihan dan memahami materi yang disampaikan.

Indikator pelatihan menggambarkan proses pembinaan aparatur desa yang dilaksanakan melalui bimbingan teknis oleh pihak kecamatan. Pelatihan tersebut berkaitan dengan penggunaan teknologi administrasi, pelayanan kependudukan, serta sistem perpajakan. Keberadaan pelatihan menjadi bagian dari proses pendukung bagi aparatur desa dalam menyesuaikan diri dengan sistem kerja berbasis teknologi yang diterapkan dalam pemerintahan desa.

Sementara itu, indikator pengalaman menunjukkan variasi pengalaman kerja perangkat desa yang terbentuk dari perbedaan masa kerja dan rentang usia. Aparatur dengan masa kerja lebih lama memiliki pengalaman dalam memahami alur kerja dan prosedur pemerintahan desa, sedangkan aparatur dengan masa kerja lebih baru terlibat langsung dalam penggunaan sistem administrasi berbasis teknologi. Interaksi antaraparatur dengan latar pengalaman yang berbeda membentuk dinamika kerja dalam pelaksanaan tugas pemerintahan desa.

Dengan demikian, matriks komparatif ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antara pendidikan, pelatihan, dan pengalaman sebagai bagian dari kondisi pengembangan kapasitas sumber daya manusia di Pemerintahan Desa Balongdowo. Ketiga indikator tersebut saling melengkapi dalam membentuk pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan administrasi di tingkat desa.

Selain indikator pendidikan, pelatihan, dan pengalaman, pengembangan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa juga dapat dilihat melalui dimensi manajerial, yang meliputi kapasitas kepemimpinan (*leadership capacity*) dan dukungan organisasi (*organizational support*). Dalam konteks Pemerintahan Desa Balongdowo, kapasitas kepemimpinan tercermin dari peran kepala desa

dan sekretaris desa dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas serta mendampingi perangkat desa dalam kegiatan pemerintahan sehari-hari.

Berdasarkan hasil wawancara, perangkat desa yang memiliki masa kerja lebih lama, seperti Sekretaris Desa dan Bendahara, berperan sebagai rujukan informal bagi perangkat desa yang lebih baru. Peran tersebut terlihat dalam pemberian arahan teknis, penjelasan prosedur administrasi, serta pendampingan dalam penggunaan sistem kerja yang diterapkan di desa. Proses ini menunjukkan adanya pola pembelajaran internal yang berlangsung melalui interaksi antarperangkat desa, di mana pengalaman kerja menjadi sumber pengetahuan yang dibagikan secara langsung dalam pelaksanaan tugas.

Dalam praktiknya, pembinaan dan pendampingan tersebut berlangsung secara situasional dan menyesuaikan dengan kebutuhan yang muncul dalam pelaksanaan pekerjaan. Tidak terdapat mekanisme pendampingan formal yang secara khusus dirancang, sehingga proses peningkatan kemampuan aparatur berjalan melalui pengalaman kerja sehari-hari dan interaksi antarperangkat desa. Dalam konteks ini, peran kepemimpinan kepala desa dan sekretaris desa terlihat dalam mengarahkan dan memfasilitasi pelaksanaan tugas serta koordinasi internal pemerintahan desa.

Dimensi lain yang berkaitan dengan pengembangan kapasitas aparatur desa adalah dukungan organisasi, yang mencakup aspek anggaran, kebijakan, dan koordinasi antartingkat pemerintahan. Temuan lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan pelatihan bagi perangkat desa di tingkat desa dipengaruhi oleh perencanaan dan ketersediaan anggaran dalam APBDes. Dalam kondisi tersebut, kegiatan pelatihan bagi perangkat desa lebih banyak difasilitasi melalui pembinaan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak kecamatan.

Peran kecamatan terlihat dalam penyelenggaraan pelatihan dan bimbingan teknis yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan, penggunaan teknologi, serta pelayanan publik. Melalui koordinasi antartingkat pemerintahan, perangkat desa memperoleh kesempatan untuk mengikuti kegiatan pembinaan yang mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan desa. Kondisi ini menggambarkan adanya keterkaitan antara dukungan organisasi di tingkat desa

dan peran pemerintah di tingkat kecamatan dan kabupaten dalam pengembangan kapasitas aparatur desa.

Dengan demikian, dimensi kepemimpinan dan dukungan organisasi dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan pola pembinaan, pendampingan, serta koordinasi yang berlangsung dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia di Pemerintahan Desa Balongdowo. Kedua dimensi tersebut menjadi bagian dari konteks kelembagaan yang membentuk proses pembelajaran dan pelaksanaan tugas aparatur desa.

D. SIMPULAN

Penelitian ini menganalisis pengembangan kapasitas sumber daya manusia aparatur di Pemerintahan Desa Balongdowo Kecamatan Candi melalui indikator pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja, serta didukung oleh dimensi kepemimpinan dan dukungan organisasi. Pengembangan kapasitas aparatur desa dalam penelitian ini dipahami sebagai proses yang terbentuk dari karakteristik sumber daya manusia dan konteks kelembagaan dalam pelaksanaan pemerintahan desa.

Indikator pendidikan menunjukkan bahwa perangkat desa Balongdowo memiliki latar belakang pendidikan yang beragam, yang menjadi bagian dari karakteristik aparatur dalam memahami kebijakan dan prosedur administrasi pemerintahan desa. Pelatihan bagi perangkat desa dilaksanakan melalui kegiatan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh pihak kecamatan, terutama yang berkaitan dengan penggunaan teknologi administrasi pemerintahan, pelayanan administrasi kependudukan, dan sistem perpajakan. Di tingkat desa, pelatihan yang bersumber dari anggaran desa lebih banyak diarahkan pada kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui PKK dan kader.

Indikator pengalaman menunjukkan bahwa perangkat desa memiliki pengalaman kerja yang beragam, yang terbentuk dari perbedaan masa kerja dan rentang usia. Pengalaman tersebut tercermin dalam pelaksanaan tugas administrasi dan penggunaan sistem kerja berbasis teknologi. Proses

pengembangan kapasitas aparatur desa juga dipengaruhi oleh peran kepemimpinan kepala desa dan sekretaris desa dalam koordinasi dan pendampingan, serta dukungan organisasi melalui koordinasi antartingkat pemerintahan, khususnya peran kecamatan dalam penyelenggaraan pembinaan dan pelatihan teknis. Keseluruhan temuan tersebut memberikan gambaran mengenai kondisi pengembangan kapasitas aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi Hapsari, R. (2021). *PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA DALAM OPTIMALISASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (Studi di Desa Ngimbrang Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung)*. www.dindukcapil.temanggungkab.go.id
- Agusta, E., & Jaya, I. (2021). *PROFESIONALISME APARATUR PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN KUALITAS KINERJA YANG LEBIH BAIK DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK*.
- Alianinggrum, N. N., Almadinah, B., Pertiwi, A. K., Pembangunan, U., Veteran Jakarta, N., Raya, J. R. F., Labu, P., & Cilandak, K. (2023). *Penyaringan Fakta dan Tanggung Jawab Jurnalisme Digital: Menghadapi Tantangan Disinformasi pada Pemilu 2024*. <https://idereach.com/Journal/index.php/JSC>
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). *Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. <http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/ihsan>
- Candra Susanto, P., Ulfah Arini, D., Yuntina, L., & Panatap Soehaditama, J. (2024). *Konsep Penelitian Kuantitatif: Populasi, Sampel, dan Analisis Data (Sebuah Tinjauan Pustaka)*. <https://doi.org/10.38035/jim.v3i1>
- Choiriyah, I., Mursyidah, L., Sukmana, H., & Agustina, I. (2021). The Role of the Village Government in Improving Public Services for the Keboansikep Village Community. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 2(1), 11. <https://doi.org/10.47134/villages.v2i1.238>
- Fitriani, F., Saharuddin, A. D., & Masyhadiah, M. (2021). PROFESIONALISME KEPALA DESA SEBAGAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PENINGKATAN PEMERINTAH DESA DI DESA TAAN. *Journal Peqguruang: Conference Series*, 2(2), 825. <https://doi.org/10.35329/jp.v3i2.2209>
- Griffin, R. W., & Gina Gania. (2004). *Manajemen* (7th ed.). Erlangga.
- Haliza, & Fatimah. (2024). *ANALISIS PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI APARATUR DESA DI DESA KALUPPINI KABUPATEN*

- ENREKANG. *DECISION: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31850/decision.v5i2.3293>
- Hidayat, R., Timumun, U., Prihatini, F., Tui, D., & Tohopi, R. (2024). Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Dalam Menuju Desa Digital di Desa Doulan Kecamatan Bokot Kabupaten Buol. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(9), 420–424. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13846434>
- Khumaidi, & Fani, H. (2024). STRATEGI PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PEMERINTAHAN DESA SENTUL PURWODADI PASURUAN. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 4.
- Lumbanraja, P. L., & Lumbanraja, P. C. (2024). *SISTEMATIKAL REVIEW: PENINGKATAN KOMPETENSI SDM UNTUK MENCAPAI TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (STUDI KASUS PADA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI INDONESIA)* (Vol. 7, Issue 1). <https://10.0.205.137/jikk.v7i1.574>
- Moeljono, & Alfiyanto, N. (2020). Up Grading Capacity Aparatur Desa Melalui Pelatihan di Desa Tegalarum Kabupaten Demak. In *Januari* (Vol. 3, Issue 1).
- Mozin, Y., & Isa, R. (2023). *Optimalisasi Pelayanan Publik dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa*. 4.
- Nikodimus. (2022). *PENGUATAN KAPASITAS PERANGKAT DESA DALAM MENINGKATKAN SUMBER DAYA APARATUR DESA. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2017*.
- Pramono, J., & Suranto, J. (2022). Peningkatan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di Kelurahan Pucangsawit Kecamatan Jebres Kota Surakarta. *Jurnal Abdimas Serawai*, 2. <http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAMS>
- Ragil Kuncoro, A., Hartono, S., Wibowo, O., Keuangan Negara STAN, P., & Aset, M. (2024). *PEMBERDAYAAN SDM BUMDESA: STUDI KASUS DI KABUPATEN TULUNGAGUNG*. 6(1).
- Ramli. (2020). Tugas, Kewenangan, Hak, Dan Kewajiban Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi*, 2, 16.
- Riewpassa, A., Patria Latuheru, B., & Godprit Haris Touwely, dan. (2025). Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Desa: Upaya Mewujudkan Pelayanan Prima. *KAMBOTI: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5, 72–82. <https://doi.org/10.51135/kambotivol5issue2p>
- Rodiyah, I., Sukmana, H., Choiriyah, I. U., Program,), Administrasi, S., Universitas, P., & Sidoarjo, M. (2021). PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM APARATUR DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA KENONGO KECAMATAN TULANGAN KABUPATEN SIDOARJO. *PUBLISIA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 6–7. <https://doi.org/10.26905>
- Sabilatur Rosyidah, Amanda Putri Febrianti, Yashinta Nursalsabila, Rosida Yanti, Milasari Milasari, Nova Vatmawati, & Enos Paselle. (2023). Proses Pengembangan dan Evaluasi Sumber Daya Manusia Aparatur.

- Dinamika Publik: Jurnal Manajemen Dan Administrasi Bisnis*, 2(1), 07–21. <https://doi.org/10.59061/dinamikapublik.v2i1.550>
- Siregar, D. R. B., & Suryani, A. (2025). *Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa melalui Pelatihan Manajemen SDM Berbasis Kompetensi di Desa Tanjung Siram, Kecamatan Bilah Hulu*. 273–279.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009.
- Wijaya, T. W., Damarjati, C., & Kurnianti, A. (2023). *OPEN ACCESS Peningkatan Sumber Daya Manusia Dalam Mengelola Sistem Informasi Desa Berbasis Website Increasing Human Resources in Managing Website-Based Village Information Systems*. 8(2). <https://doi.org/10.25047/j-dinamika.v8i2.4017>
- Yuliana. (2024). KONFLIK LAHAN DI PROVINSI JAMBI. *Aktualita: Jurnal Penelitian Sosial Dan Keagamaan*, 14. www.ejournal.an-nadwah.ac.id